

# Dinilai Belum Taat

## Banyak Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti

**PONTIANAK** - Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terungkap dalam Laporan Panitia Khusus DPRD Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Pemprov 2010, yang disampaikan dalam sidang paripurna, Rabu (21/9) di Gedung DPRD.

Ketua Pansus LHP Tony Kurniadi mengatakan, dalam menelaah LHP BPK ini, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan misalnya rapat-rapat internal pansus, studi banding ke Jawa Timur,

konsultasi ke Inspektorat Jenderal dan BAKD Kementerian Dalam Negeri, rapat dengan tim tindak lanjut dan TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) eksekutif serta melakukan konsultasi ke BPK.

Dari serangkaian kegiatan tersebut, Pansus mendapati bahwa untuk temuan menyangkut Sistem Pengendalian Intern, sesuai LHP No. 26.B / HP/ XIX.

PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011, sejauh ini pemprov baru menyelesaikan 63,64 persen dari keseluruhan tindak lanjut yang wajib diselesaikan.

"Untuk Sistem Pengendalian Intern ini, ada 11 temuan, 24 rekomendasi dan 33 keluaran. Sedangkan tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu sejumlah 21 sedang-

kan yang belum adalah 12," jelasnya.

Sementara untuk temuan menyangkut kepatuhan, sesuai LHP No. 26.C/HP/XIX. PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011, pemprov telah menyelesaikan 88,24 persen dari keseluruhan tindak lanjut yang wajib diselesaikan.

Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan terkait kepatuhan ini, BPK memperoleh 9 temuan dan memberikan 24 rekomendasi serta 34 keluaran. Sementara tindak lanjut yang telah dilaksanakan pemprov baru sejumlah 30. Selain itu, terungkap pula bahwa ada sebagian kerugian daerah yang belum dituntaskan.

• ke halaman 15 kolom 2

**METRO  
HARI INI**



## Dinilai Belum Taat

*Sambungan dari halaman 9*

Menyikapi hal ini, Pansus DPRD merekomendasikan agar gubernur selaku penanggung jawab utama SKPD dapat bersikap tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPK. Gubernur juga diharapkan dapat memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang melakukan kesalahan berulang-ulang.

Selain itu, Pansus pun meminta gubernur memerintahkan para pimpinan SKPD yang mendapat temuan dari BPK, agar segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk penyelesaiannya. Terkait dengan masalah ganti rugi keuangan daerah, pemprov diminta segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP/TGR kepada DPRD Kalbar.

Hal ini agar dalam melaksanakan tugasnya, majelis

pertimbangan TP/TGR dapat membedakan kasus yang memang merupakan tugas majelis pertimbangan, dan kasus mana yang masih dalam proses tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

"Pansus meminta Saudara Gubernur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi majelis pertimbangan TP/TGR dan memerintahkan saudara sekretaris daerah untuk melakukan pengawasan intensif kepada SKPD-SKPD yang ada," ujar Tony.

Tak hanya itu, Pansus pun merekomendasikan supaya gubernur secara tegas melarang pimpinan SKPD membuka rekening-rekening liar, apapun alasannya karena hal itu dapat menjadi sumber penyimpangan. Di sisi lain, pemprov diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kerugian daerah dengan

mengintensifkan pembinaan dan pengendalian terhadap aparat pemerintah.

"Pemprov hendaknya dapat memaksimalkan fungsi inspektorat dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan memberikan dukungan pendanaan yang memadai sehingga inspektorat dapat bekerja lebih optimal," katanya. Khusus kepada para pihak yang telah menimbulkan terjadinya kerugian daerah/negara, pemprov dikesak untuk segera meminta pertanggungjawaban.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyambut positif hasil kerja Pansus. Ia juga menyatakan bahwa pemprov segera akan menindaklanjuti semua temuan BPK. Sebab, temuan-temuan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan pemprov belum dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian. "Temuan-temuan itu akan ditindaklanjuti dan rekomendasi dewan akan segera kita laksanakan," ujarnya. (ron)